

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

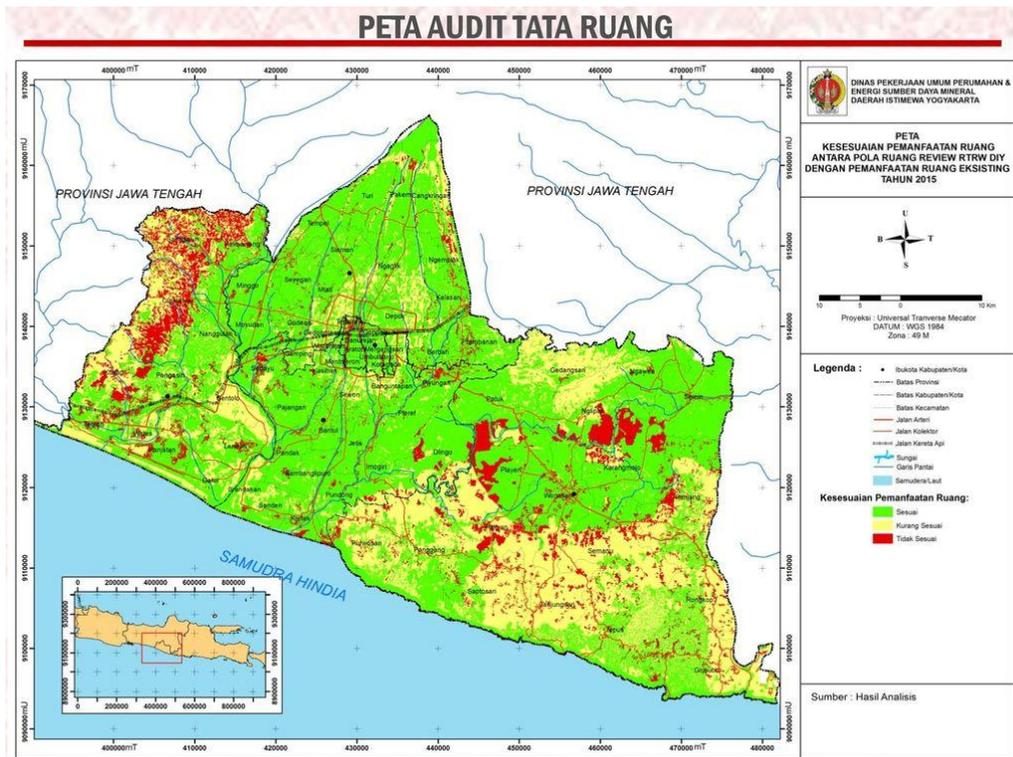
Dalam pengembangan karya ilmiah pada bab gambaran umum ini menjelaskan tentang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesultanan Ngayogyakarta, Pemda DIY, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Data diambil dan diolah dengan cara studi pustaka, mengambil literatur literatur dari berbagai sumber bacaan baik buku cetak, jurnal ilmiah, media elektronik, dan lain sebagainya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari bagian administrasi Pemerintahan Republik Indonesia. Provinsi DIY merupakan salah satu dari empat (4) daerah di Indonesia yang diberi mandat oleh undang undang sebagai wilayah administrasi yang istimewa untuk mengelola daerahnya sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis terletak pada $70^{\circ}33' \text{ LS} - 8^{\circ}12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ}00' \text{ BT} - 110^{\circ}50' \text{ BT}$ dan secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Utara, Timur, dan Barat juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia/ Indonesia di sebelah selatan. Dengan pemerintah daerah yang istimewa saat ini Provinsi DIY menyongsong slogan falsafah jawa "*Rasa Suka Ngesthi Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri*", yang artinya kurang lebih "Dengan rasa gembira membangun Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik dan selamat terus Berdiri Tegak".

Melansir dari situs web Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan luas wilayah $3.185,80 \text{ km}^2$ terbagi secara administratif atas satu (1) kotamadya sebagai

ibukota provinsi, yaitu Kota Yogyakarta dan terbagi atas empat (4) kabupaten, yaitu; Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

Gambar 2.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Dinas PUPESDM DIY diakses pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY TA 2017 (2017)

Adapun jumlah kepanewon, jumlah kalurahan/ kelurahan/ desa, dan juga luas wilayah yang terbagi dalam setiap kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi DIY tersajikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.1 Jumlah kepanewon, kalurahan/ kelurahan/ desa, dan luasan di setiap wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY Tahun 2019

| No | Kota/ Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kalurahan/ Kelurahan/ Desa | Luas Wilayah |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Kota Yogyakarta | 14 | 45 | 32,5 km ² |
| 2 | Kab. Sleman | 17 | 86 | 574, 82 km ² |
| 3 | Kab. Gunungkidul | 18 | 144 | 1485,36 km ² |
| 4 | Kab. Bantul | 17 | 75 | 506,85 km ² |
| 5 | Kab. Kulonprogo | 12 | 88 | 586,27 km ² |
| <i>Sumber: BPS DIY (2021)</i> | | | | |

2.1.1 Gambaran Geografis Provinsi DIY

Secara Geografis Provinsi DIY terletak pada posisi 70°33' LS - 8°12' LS dan 110°00' BT - 110°50' BT dengan luasan wilayah 3.185,80 km² yang berbatasan dengan;

- Utara : Kabupaten Magelang dan Boyolali
- Timur : Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri
- Selatan : Samudra Hindia/ Indonesia
- Barat : Kabupaten Purworejo

Berbekal data Dinas Pertanahan DIY, kemiringan wilayah Provinsi DIY terbagi dalam empat (4) kategori kemiringan dengan luasan wilayah berikut; Pertama, dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km²; Kedua, dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km²; Ketiga, dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km²; dan yang keempat dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

Lebih lanjutnya Provinsi DIY terbagi kedalam empat (4) kategori ketinggian lahan yang dijelaskan sebagai berikut, wilayah ketinggian kurang dari

100 mdpl dengan presentase 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl dengan presentase 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl dengan presentase 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian yang lebih dari 1000 mdpl dengan presentase 0,47%.

Provinsi DIY memiliki kondisi dengan kekayaan fidiografis daerah sehingga juga dapat dikatakan dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang terbagi dalam empat (4) satuan, yaitu;

- a) Satuan Pegunungan Selatan, dengan ketinggian 150-700 mdpl yang terletak pada Kab. Gunungkidul seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$ dengan kekayaan alam batu gamping. Meski begitu kondisi ini menyebabkan sebagian besar wilayahnya adalah wilayah kering yang terbentang di timur laut Provinsi DIY.
- b) Satuan Gunung Berapi Merapi, dengan ketinggian 80-2.911 mdpl yang terbentang di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$ dengan kekayaan alluvial dari kerucut gunung berapi hingga vegetasi hijau alam merupakan tanah yang subur. Satuan wilayah ini dijadikan sebagai konservasi hutan lindung meski diantara Kawasan wilayahnya dijadikan sebagai wilayah pertambangan galian golongan C.
- c) Wilayah dataran rendah diantara satuan Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo, dengan ketinggian 0-80 mdpl yang terbentang di wilayah selatan Kabupaten Kulonprogo hingga Kabupaten Bantul seluas $\pm 216,25 \text{ km}^2$ dengan kekayaan fluvial juga merupakan tanah yang subur.

Di wilayah ini terdapat kekayaan darat dan laut yang dapat dimanfaatkan, meski penggunaannya lebih banyak memanfaatkan wilayah kekayaan darat.

- d) Wilayah Pegunungan Kulonprogo dan dataran rendah sekitarnya, dengan ketinggian 0-572 mdpl yang terletak di Kabupaten Kulonprogo seluas $\pm 706,52 \text{ km}^2$ dengan kekayaan lahan yang memiliki lahan yang terbentuk dari proses erosi, pelapukan, sedimentasi, dan lain sejenisnya. Wilayah ini memiliki karakteristik yang berbukit dan lereng curam.

2.1.2 Gambaran Demografi Provinsi DIY

Menurut data BPS Provinsi DIY pada tahun 2020, penduduk Provinsi DIY mencapai $\pm 3.882.288$ jiwa. Dengan luas $3.185,80 \text{ Km}^2$ dan dipadukan dengan potensi jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk pada Provinsi DIY pada angka $1.218,6 \text{ jiwa/Km}^2$.

| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk DIY yang tersebar di kabupaten dan kota | | | |
|--|-----------------|------------|------------|
| Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk | | |
| | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| Kab. Bantul | 1.006.692 | 1.018.402 | 1.029.997 |
| Kab. Gunungkidul | 736.210 | 742.731 | 749.274 |
| Kab. Kulon Progo | 425.758 | 430.220 | 434.483 |
| Kab. Sleman | 1.206.714 | 1.219.640 | 1.232.598 |
| Kota Yogyakarta | 427.498 | 431.939 | 435.936 |
| Total | 3.802.872 | 3.842.932 | 3.882.288 |

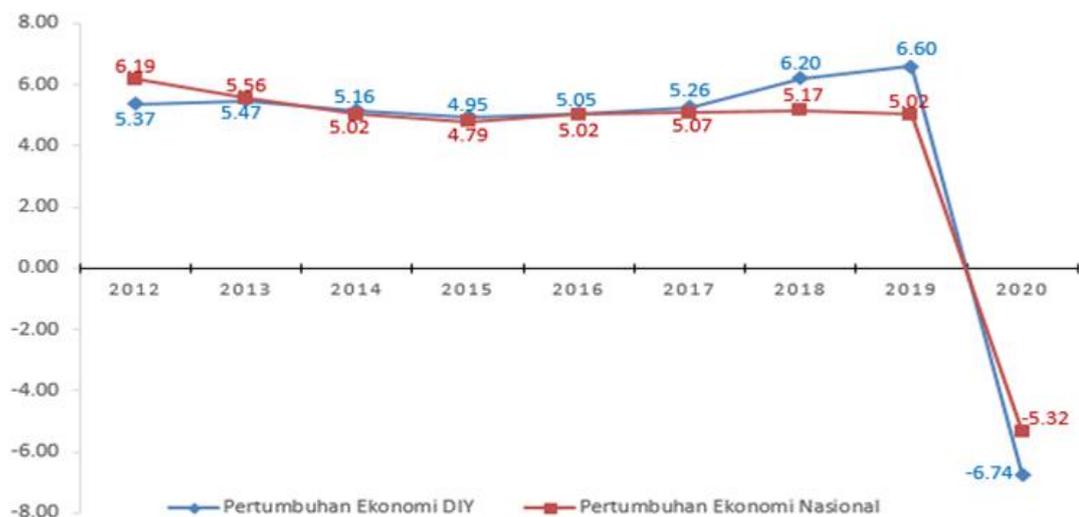
Sumber: BPS DIY (2021)

Persebaran penduduk di DIY dapat disebutkan dalam kategori tidak merata. Jumlah Penduduk di Provinsi DIY paling banyak pada 2020 terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah $\pm 1.232.598$ jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah ± 434.483 jiwa.

Menurut data yang diambil dari situ laman BPS Provinsi DIY (www.yogyakarta.bps.go.id), pertumbuhan penduduk di DIY dalam kurun waktu tahun 2000-2010 pada poin 1,03% pertahunnya. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai data acuan terbaru, laju pertumbuhan penduduk di DIY pada poin 1.18% pertahunnya.

2.1.3 Gambaran Ekonomi Provinsi DIY

Grafik 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional



Sumber: Paniradya Kaistimewan (2020)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja perekonomian suatu wilayah, dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2015 hingga 2019, cenderung meningkat. Selama periode tersebut, rerata laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5 %, sebagai level pertumbuhan tertinggi yang dicapai DIY selama satu dasawarsa terakhir. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi DIY cenderung stabil diatas rerata nasional, karena dominasi pertumbuhan industri kreatif DIY dan pertumbuhan sektor UMKM yang

sangat mendominasi perekonomian DIY dengan mengandalkan jasa pariwisata dan pendidikan. Namun pada Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi yang dalam, yaitu sebesar 6,74 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar kategori tumbuh negatif dengan kontraksi pertumbuhan yang dalam terjadi pada kategori jasa lainnya yaitu -42,75 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum -39,34 persen, transportasi dan pergudangan -34,30 persen, dan konstruksi -22,18 persen. Meskipun demikian, beberapa lapangan usaha masih mampu tumbuh cukup tinggi, yaitu informasi dan komunikasi 20,74 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,91 persen, serta pertanian sebesar 10,06 persen.

2.2 Gambaran Umum Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Asal usul Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam sejarahnya lahir dikarenakan adanya permasalahan internal dari Kasultanan Mataram Islam. Momentum puncaknya hingga penobatan Sunan Pakubuwono III yang didukung oleh VOC memantik pemberontakan pemerontakan oleh Pangeran Mangkubumi (s.d. Sri Sultan Hamengku Buwono I) dan Pangeran Sember Nyawa (s.d. Adipati Mangku Nagoro I). Perang dari berbagai pihak tidak dipungkiri antara Sunan dengan para Pangeran Dalem dan pihak VOC.

Adanya peperangan dalam internal Kasultanan Mataram Islam mendorong adanya jalur perdamaian yang berupa dua (2) perjanjian besar dengan pada tahun 1755 yang diketahui sebagai Perjanjian Giyanti dan pada tahun 1757 yang dikenal sebagai Perjanjian Salatiga, Kedua perjanjian besar ini membagi Kasultanan Mataram pada tiga (3) kekuasaan besar, yang diantaranya; Kasunanan Surakarta

yang dipimpin oleh Wangsa Pakubuwono, Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Wangsa Hamengku Buwono, dan Kadipaten Mangku Nagoro yang dipimpin oleh Wangsa Mangku Nagoro.

Gambar 2.3 Teks Perjanjian Giyanti



Sumber: Sejarah Pemerintahan DIY (2017)

Ngayogyakarta Hadiningrat, dimaklumkan atau diplokamirkan oleh Pangeran Mangkubumi atau yang dikenal dengan (Swargi Dalem) Sri Sultan Hamengku Buwono I pada 13 Maret 1755 (dalam Kalender Jawa, 29 Jumadil'awal 1680 Be). Kasultanan Ngayogyakarta awalnya dipusatkan pada Daerah Ambarketawang (5 Km dari Kota Yogyakarta), akan tetapi pada Tahun 1756 s.d. Sri Sultan Hamengku Buwono I memindahkan pusat pemerintahan dari Ambarketawang menuju Kawasan Hutan Paberingan. Hutan Paberingan saat ini banyak dikenal oleh masyarakat termasuk oleh penulis dengan Kompleks Ageng Keraton Ngayogyakarta.

Pada awal mulanya, Kasultanan Ngayogyakarta dibentuk dan dibagi kedalam tiga (3) struktur kekuasaan secara wilayah, yang diantaranya

1. *Nagara*, yang didalam sebuah *Nagara* terdapat *kuthanagara* (ibu kota). Wilayah kekuasaan ini merupakan wilayah dari pusat dari peradaban dan aspek pemerintahan yang ada di Kasultanan Ngayogyakarta.
2. *Nagara Agung*, penulis memahami bahwa kekuasaan *Nagara Agung* adalah wilayah kekuasaan setingkat karisidenan dan kabupaten yang berdaulat dalam satuan Kasultanan Ngayogyakarta. Sejarah Pemerintahan DIY (2017) menyebutkan pembagian *Nagara Agung* terdiri dari; Mataraman (Yogyakarta), Pajang (barat daya Surakarta), Bang Wetan (Sragen), Kedu, Karangjati – Ungaran, Bagelen, dan Bumi Gede.
3. *Mancanagara*, penulis memahami bahwa kekuasaan *Mancanegara* merupakan wilayah yang berdaulat setingkat karisidenan dan kabupaten yang berada di luar kedaulatan Kasultanan Ngayogyakarta. Sejarah Pemerintahan DIY (2017) menyebutkan pembagian kekuasaan *Mancanagara* terbagi atas; Madiun, Banyumas, Caruban, Tulungagung, Mojokerto, Magetan, Pacitan, Kertasana, Kediri, Kalangbret, Ngawen, Bojonegoro, Grobogan, Kuwu Wirosari, Selo, dan Kaduwang.

Tata kehidupan bermasyarakat dan sosial pada masa Kasultanan Ngayogyakarta terbagi atas Raja, *Kaluwargan* dan *Kabangsawanan*, dan *Kawula*

Dalem serta *Kawula Alit*. Pertama, Raja merupakan puncak dari tatanan kekuasaan pada masa Kasultanan Ngayogyakarta. Oleh karenanya raja mengemban gelar *Senapati ing Ngalaga* (panglima besar dalam pertempuran), *Sayyidin Pranatagama* (pemangku agama dan spiritual), dan *Khalifahtullah* (pemimpin). Posisi Kedua, terdapat keluarga dan kabangsawanan, tatanan kekuasaan dalam masyarakat yang memiliki kedudukan dibawah raja yang didalamnya dapat terbagi atas *Garwa Padmi* (Permaisuri), *Garwa Ampeyan* (Selir), *Sentana Dalem*, Putra – Putri *Dalem*, *Wayah Dalem*, hingga Bupati. Ketiga, *Kawula Dalem* dan *Kawula Alit*. *Kawula Dalem* merupakan seorang rakyat yang mengabdikan dirinya kepada Kasultanan Ngayogyakarta sepanjang hidupnya, sedangkan *Kawula Alit* dapat dinyatakan dengan masyarakat dengan profesi biasa sebagai masyarakat pada umumnya. Meski terdapat pembagian tatanan kekuasaan secara sosial, kesatuan dan kepaduan nilai luhur memanusiasikan manusia untuk mencapai nilai kehidupan yang harmonis antara bangsawan dan rakyat kecil maka sistem pembagian kekuasaan hanya terjadi dalam kedudukan pemerintahan dan pemberian pelayanan terhadap public. Sehingga ketimpangan sosial tidak terjadi secara vertikal.

Selanjutnya Kasultanan Ngayogyakarta telah dipimpin oleh sepuluh (10) generasi Wangsa Hamengku Buwono, yang terbagi dalam linimasa sebagai berikut;

| Tabel 2.3 Daftar Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|
| No | Sultan Ngayogyakarta | Nama Kecil | Periode Bertahta |
| 1 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono I | Pangeran Mangkubumi | 1755 – 1792 |
| 2 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono II | GRM. Sundoro | 1792 – 1810 1811 – 1812 1826 – 1828 |
| 3 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono III | GRM. Surodjo | 1810 – 1811 1812 – 1814 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono IV | GRM. Ibnu Djarot | 1814 – 1823 |
| 5 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono V | GRM. Gathot Menol | 1823 – 1855 |
| 6 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono VI | GRM. Mustodjo | 1855 – 1877 |
| 7 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono VII | GRM. Murtedjo | 1877 – 1921 |
| 8 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono VIII | GRM. Sudjadi | 1921 – 1939 |
| 9 | (s.d) Sri Sultan Hamengku Buwono IX | GRM. Dorodjatun | 1940 – 1988 |
| 10 | Sri Sultan Hamengku Buwono X | BRM. Herjuno Dariopto | 1989 – sekarang |
| <i>Sumber: Sejarah Pemerintahan DIY (2017)</i> | | | |

Raja Ngayogyakarta dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh seorang perdana menteri yang dikenal sebagai *Pepatih Dalem* dengan gelar Patih Danureja. Dalam perkembangan sejarahnya pada era penguasaan Belanda dan Inggris di Nusantara, *Pepatih Dalem* memiliki dwifungsi tugas sebagai pembantu raja dan pembantu dari residen/perwakilan Kerajaan Belanda. Kemudian pada masa *Swargi Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebelum bertahta, beliau melakukan penghapusan jabatan dari *Pepatih Dalem* sehingga Sultan Hamengku Buwono memegang penuh kekuasaan tata negara dan tata pemerintahan.

Selain dibantu oleh *Pepatih Dalem*, raja juga dibantu kewenangan tugasnya melayani masyarakat oleh beberapa kementerian, yang diantaranya adalah *Kanayaka Keparak Kiwo* dan *Kanayaka Keparak Tengen* yang bertugas sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan; *Kanayaka Gedong Kiwo* dan *Kanayaka Gedong Tengen* yang bertugas sebagai Kementerian Keuangan; *Kanayaka Sitisewu* dan *Kanayaka Bumijo* sebagai Kementerian Tanah dan *Kaprajan*; serta *Kanayaka Numbakanyar* dan *Kanayaka Panumping* yang merupakan Kementerian Pertanian.

Kemudian untuk urusan agama dan spiritual, raja membentuk badan yang dikenal sebagai *Kawedanan Pengulon*. Sedangkan untuk tata praja yang berada di tingkat bawah di bagi atas Bupati yang memiliki gelar *Kanjeng Raden Tumenggung*, *Panewu* yang memimpin di tingkat *kepanewon* (kecamatan), dan *Ki Lurah* yang memimpin di tingkat *kalurahan* (desa/kelurahan).

Kasultanan Ngayogyakarta melewati beberapa sejarah yang sangat panjang dari era kolonialisasi hingga saat Sewindu Keistimewaan DIY. Momentum awal dari Kasultanan Ngayogyakarta tergabung dalam NKRI sebagai pemerintahan daerah yang bersifat istimewa hingga tahun 2020 akan dijelaskan singkat pada Sub-Subbab 2.3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambaran umum dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dijabarkan secara sederhana oleh penulis memuat dari sejarah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Kasultanan Ngayogyakarta yang pada penelitian “Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam Refleksi Sewindu Kestimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” masih bertahan dan ada. Bahkan sejarah Kasultanan Ngayogyakarta merupakan cikal bakal dari sejarah dan leluhur leluhur dari Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

2.3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaklumkan oleh *Swargi Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX* pada 5 September 1945, yang pada isinya sebagai berikut;

AMANAT

Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan:

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung jawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami yang memerintah supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

Hamengku Buwono IX

Sumber: Sejarah Pemerintahan DIY (2017) Halaman 197.

Menurut maklumat diatas yang telah diamanatkan *Swargi Dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX, maka Kesultanan Ngayogyakarta menjadi bagian yang sah dari Pemerintah Daerah yang bersifat istimewa dibawah naungan Pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya adanya pengakuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menghilangkan esensi nilai budaya yang sudah ada dan tetap menghormati keberadaan kasultanan dan kadipaten. Oleh karenanya Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur dan Paduka Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur.

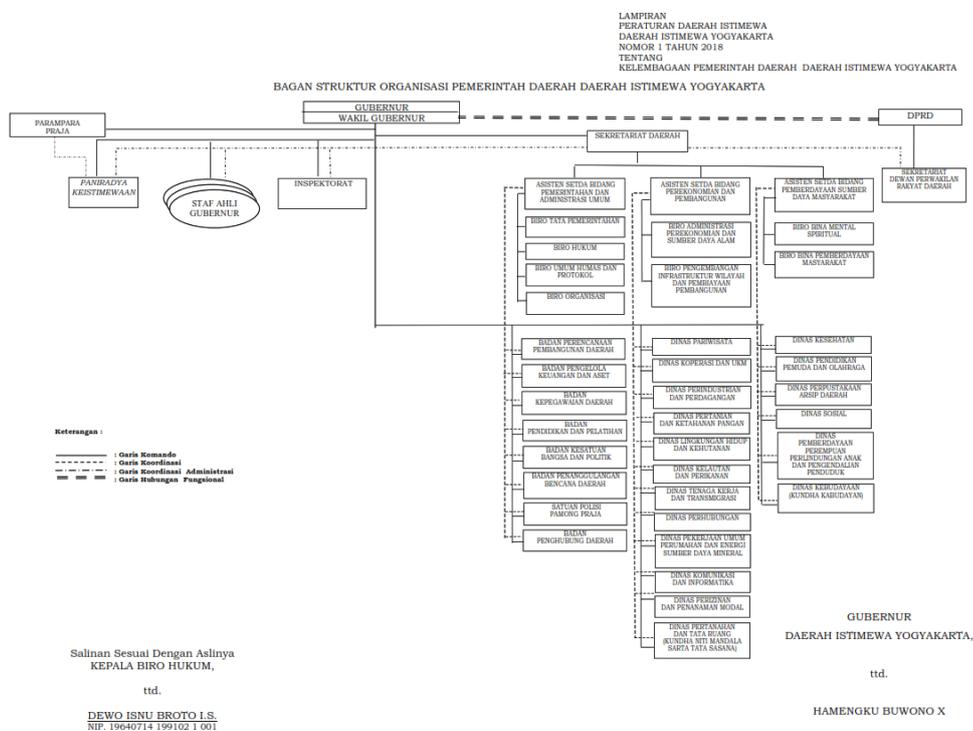
Momentum demi momentum banyak dilewatkan oleh segenap Masyarakat Yogyakarta termasuk bagian dari sejarah yang panjang bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari pasca Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi dan bahkan hingga tahun 2020. Salah satu yang menjadi sejarah besar bagi awal gerbang pengakuan Keistimewaan DIY terjadi dengan adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang Undang tersebut menguatkan adanya keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Beberapa urusan penting yang menguatkan keistimewaan DIY terjabarkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang dijelaskan sebagai berikut;

1. Urusan khusus tatacara pengisian gubernur dan wakil gubernur,
2. Urusan khusus kelembagaan,
3. Urusan khusus pertanahan,
4. Urusan khusus tata Ruang, dan
5. Urusan khusus kebudayaan,

Selain kelima urusan yang telah disebutkan diatas, tujuan Keistimewaan DIY juga dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang dapat dijabarkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis; menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat; mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin Ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka NKRI; menciptakan pemerintahan yang baik; serta melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan Budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pada tahun 2021 dalam pengalaman kuliah kerja praktik penulis, dapat ditambahkan gambaran umum dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY beribukota pada Kota Yogyakarta, dan pusat kegiatan pemerintahannya berada pada Gedung Kepatihan, Suryatmajan, Kota Yogyakarta. Kemudian untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X dibantu satuan Organisasi Perangkat daerah yang digambarkan dalam bagan berikut;

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah DIY



Sumber: <https://jogiaprov.go.id/profil/8-struktur-organisasi>

2.3.1.1 Kondisi ASN DIY

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan juga sesuai dengan agenda dalam Rancangan Awal RPJMD, berupaya untuk menerapkan Paradigma

Manajemen Kepegawaian dari administrasi kepegawaian hingga pengelolaan negara. Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD.

Pemerintah DIY menerapkan Administrasi Kepegawaian, yaitu rangkaian kegiatan menyusun dan mencatat data dan informasi pegawai, dengan tujuan memberikan data atau informasi pegawai, kepada manajemen ASN yang merupakan rangkaian kegiatan penilaian ASN sebagai sumber daya, aset, dan faktor penentu berhasil tidaknya program pembangunan pemerintah, merupakan suatu kemajuan yang logis. Kemudian penulis menyematkan data jumlah ASN yang ada di Provinsi DIY yang menjadi pembantu satuan tugas dalam Pemda DIY sebagai berikut;

Tabel 2.4 Tabel Jumlah ASN berdasarkan Golongan di Provinsi DIY

| No | Instansi | IV/e | IV/d | IV/c | IV/b | IV/a | III/d | III/c | III/b | III/a | II/d | II/c | II/b | II/a | I/d | I/c | I/b | I/a | Jumlah |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 1 | PemdaDIY | 4 | 19 | 73 | 377 | 2660 | 1603 | 2093 | 1786 | 1048 | 413 | 218 | 213 | 60 | 66 | 14 | 34 | 1 | 10682 |
| 2 | Kab.Bantul | 2 | 5 | 46 | 231 | 2290 | 1032 | 799 | 1163 | 902 | 341 | 338 | 233 | 44 | 66 | 12 | 4 | 0 | 7508 |
| 3 | Kota Yogyakarta | 3 | 7 | 47 | 147 | 967 | 769 | 603 | 962 | 521 | 317 | 264 | 181 | 52 | 90 | 11 | 2 | 0 | 4943 |
| 4 | Kab. Sleman | 2 | 8 | 47 | 216 | 2261 | 1090 | 792 | 1775 | 1079 | 423 | 453 | 170 | 36 | 44 | 22 | 3 | 0 | 8421 |
| 5 | Kab. Kulon Progo | 0 | 4 | 49 | 122 | 1977 | 737 | 625 | 967 | 618 | 323 | 269 | 131 | 55 | 26 | 20 | 1 | 0 | 5924 |
| 6 | Kab. Gunung-kidul | 2 | 3 | 40 | 183 | 2364 | 811 | 713 | 1580 | 959 | 451 | 455 | 227 | 98 | 56 | 29 | 2 | 1 | 7974 |
| JUMLAH | | 13 | 46 | 302 | 1276 | 12519 | 6042 | 5625 | 8233 | 5127 | 2268 | 1997 | 1155 | 345 | 346 | 108 | 46 | 2 | 45452 |

Sumber: BKD DIY (2020) diakses pada *Paniradya Kasitimewan DIY*

2.4 Biografi Sultan Hamengku Buwono X

Gambar 2.5 Sultan Hamengku Buwono X dengan busana kebesaran dan PDU Gubernur



Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengku_buwana_X#/media/Berkas:Hamengkubuwono_x.jpg



Sumber:

<https://jogjaprov.go.id/p/profil-gubernur-diy>

Sultan Hamengku Buwono X memiliki nama kecil BRM. Herjuno Daripto ketika dewasa digelarkan sebagai KGPH. Mangkubumi, *miyos dalem* di Yogyakarta, 2 April 1946. Merupakan putra tertua dari *swargi dalem* Sri Sultan Hamengku Buwono IX diantara yang lain. Ibu merupakan *Garwa Ampeyan Dalem* yang Bernama KRAy. Windyaningrum. Sultan Hamengku Buwono X mengenyam pendidikan SD yang lulus tahun 1959/1960, kemudian pendidikan SMP Negeri III (lulus 1962/1963), SMA VI Yogyakarta (lulus 1965/1966), dan mengenyam Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ketatanegaraan Universitas Gajah Mada (1982).

Beliau menikah dengan Tatiek Drajad Supriastuti yang kemudian diberi gelar GKR. Hemas pada 1968. Dari pernikahan beliau dengan GKR. Hemas, beliau dikaruniai lima (5) putri dalem, diantaranya;

1. GRA Nurmalitasari (GKR Pembayun/ GKR Mangkubumi)
2. GRA Nurmagupita (GKR Condrokirono)
3. GRA Nurkamnari Dewi (GKR Maduretno)
4. GRA Nuraba Juwita (GKR Hayu)
5. GRA Nurastuti (GKR Bendoro)

Pada 7 Maret 1989 KGPH. Mangkubumi dijumenengkake sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang mengemban gelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono, Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahmanm Sayidin Panata Agama Kalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping Sedoso*. Kemudian pada tahun 1998 – saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang ke-3.